



LAKIP

BPBD
KABUPATEN NATUNA
2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Natuna atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kinerja, sekaligus bahan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kinerja BPBD Kabupaten Natuna di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kebencanaan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang konstruktif dalam peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Natuna ke depan.

Ranai, 13 Januari 2026





Lembar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi selama Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan capaian **nilai SAKIP kategori “BB” pada tahun sebelumnya**, kinerja BPBD Kabupaten Natuna pada tahun pelaporan secara umum menunjukkan hasil yang **efektif**, tercermin dari ketercapaian sebagian besar Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan sasaran strategis dalam Renstra BPBD serta mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana di wilayah Kabupaten Natuna.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yakni **“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”** dan **misi ke-1** yaitu **Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan**.

Sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang urusan Trantibumlinmas maka dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang yang tertera didalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan

Menurunkan Risiko Bencana Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Tujuan



- Indeks Pelayanan Publik
- Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBi)
- Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Sasaran

- Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam menghadapi bencana
- Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah

Capaian Kinerja

Beberapa capaian Sasaran kinerja yang disoroti meliputi:

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks	0.41	0.29	71.63 %	0.42	0.43	102 %
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	63.36	70.85	117 %	70	(Hasil Belum masuk Penilaian)	-
		Indeks	3.48	3.18	91.3 %	3.48	3.19%	91.6%

Dari aspek **efisiensi**, pengelolaan anggaran dan sumber daya dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan prinsip value for money. Kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja semakin diperkuat, sehingga realisasi anggaran mampu mendukung pencapaian output dan outcome kinerja secara proporsional dan berkelanjutan.

Adapun dari sisi **kualitas kinerja**, BPBD Kabupaten Natuna terus melakukan penguatan tata kelola melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan karakteristik geografis wilayah kepulauan menjadi perhatian dalam perbaikan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

“Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang positif sebagaimana tercermin dalam LAKIP, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, antara



lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kebutuhan peningkatan kualitas data kinerja yang lebih akurat dan tepat waktu, serta perlunya penguatan koordinasi lintas unit kerja. Selain itu, dinamika kebijakan dan keterbatasan dukungan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja secara berkelanjutan.”

Melalui penyusunan LAKIP ini, BPBD Kabupaten Natuna menegaskan komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Kenaikan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Natuna pada tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dalam upaya penguatan ketahanan daerah. Dari target yang ditetapkan sebesar 0,42 indeks, realisasi mencapai 0,43 indeks atau 102% dari target, yang mencerminkan adanya peningkatan efektivitas perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program penanggulangan bencana yang lebih terarah. Capaian ini juga mengindikasikan meningkatnya kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya ketahanan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Ranai, 13 Januari 2026



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. GAMBAR UMUM BPBD	3
E. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	9
C. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KAB. NATUNA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA BPBD	15
B. PENGUKURAN KINERJA.....	19
C. ANALISIS KINERJA	20
D. KINERJA MANDIRI BPBD	28
BAB IV	30
PENUTUP.....	30
LAMPIRAN	31



Daftar Tabel

Tabel 1.1	5
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	6
Tabel 1.4	6
Tabel 2.1	9
Tabel 2.2	13
Tabel 2.3	14
Tabel 3.1	16
Tabel 3.2	20
Tabel 3.3	21
Tabel 3.4	22
Tabel 3.5	24
Tabel 3.6	29





Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam kaitan mengelola risiko bencana dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah telah menetapkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam undang-undang ini, dijelaskan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian program, tantangan yang dihadapi, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPBD Natuna berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sistem respons bencana, dan penyediaan sarana-prasarana yang mendukung kesiapsiagaan daerah. Namun, keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya alokasi anggaran, dan tantangan koordinasi antarinstansi.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/ wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna 2025, ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Natuna ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

G. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedang tujuan yang hendak diwujudkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, melalui pengukuran dan pelaporan capaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

D. Gambaran Umum BPBD

BPBD Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2021, tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna berada dan bertanggung jawab

langsung ke Bupati Natuna.

Pada awal pembentukan BPBD Kabupaten Natuna, BPBD menempati kantor sementara di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna selama 5 hari. Ini dikarenakan BPBD masih belum memiliki gedung kantor sendiri yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas harian perkantoran. Baru pada Senin, 10 Januari 2022 BPBD bisa berpisah dari Dinas Pemadam Kebakaran setelah BPBD ditetapkan untuk menempati kompleks gedung di Gerbang Utaraku, yaitu bekas gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna. Di gedung kantor yang baru inilah, BPBD Kabupaten Natuna mulai melakukan pelayanan administrasi perkantoran serta pelayanan penanggulangan bencana.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kabupaten Natuna

Sesuai Pasal 4 ayat (1) tugas BPBD adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana
- d. Koordinasi kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat di bidang pencegahan, penanganan pengungsi, dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah dengan sigap dan tanggap
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 4 ayat (2) menerangkan fungsi BPBD sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Natuna

BPBD hanya memiliki 80 orang sumber daya manusia aparatur. Aparatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BPBD Menurut Jenis Kelamin 2025

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	PNS	20 Orang	6 Orang
2.	PPPK	10 Orang	3 Orang
3.	PTT	8 Orang	4 Orang
4.	Tenaga Ahli	-	-
5.	Tenaga Penanggulangan Bencana	12 Orang	7 Orang
6.	Tenaga Kebersihan	2 Orang	-
Jumlah		52 orang	20 orang

Jumlah pegawai laki-laki BPBD lebih besar jika dibandingkan jumlah pegawai perempuan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai BPBD Menurut Tingkat Pendidikan 2025

Pendidikan	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
SD	-	-	1 Orang	1 Orang
SLTP	1 Orang	1 Orang	-	2 Orang
SLTA	4 Orang	7 Orang	27 orang	38 Orang
DIII	3 Orang	-	-	3 Orang
DIV/SI	14 orang	5 Orang	5 Orang	24 Orang
S2	4 Orang	-	-	4 Orang
S3	-	-	-	-
Total	26 Orang	13 Orang	33 Orang	72 orang

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan setingkat SLTA terbanyak dibanding yang lain. Menyusul berikutnya pendidikan setingkat DIV/SI sebanyak 24 orang. Dan yang terendah adalah 1 orang tamatan SD.

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural BPBD

Jabatan Struktural	Jumlah
Kepala Pelaksana Badan	1 Orang
Sekretariat Pelaksana	1 Orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Orang
Bidang Kedaruratan dan Logistik	1 Orang
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Orang

Bila dilihat data di atas, Sekretariat memiliki jumlah eselon yang terbanyak jika dibandingkan yang lain. Ini karena pada Sekretariatlah banyak kegiatan pendukung untuk tiga bidang dilakukan. Sekretariat jugalah yang mempersiapkan kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari, baik dari sisi kelengkapan peralatan pendukung, ketersediaan ATK, internet, atau pun keamanan gedung kantor. Sementara pada bidang teknis, hanya melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan sistem pembagian tugas sudah berlangsung baik, sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Tabel 1.4
Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	1 Orang
4.	JF-Perencana	1 Orang
5.	JF-Analis Kebijakan	1 Orang
6.	JF-Analis Kebencanaan	5 Orang
7.	JF-Penata Penanggulangan Bencana	3 Orang
8.	Konselor SDM	1 Orang
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	4 Orang
10.	Penata Layanan Operasional	5 Orang
11.	Operator Layanan Operasional	6 Orang
12.	Pengadministrasi Perkantoran	6 Orang
13.	Pengelola Umum Operasional	1 Orang

NO	JABATAN	JUMLAH
14.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	12 Orang
15.	Tenaga Penanganan Bencana (TPB)	19 Orang
16.	Tenaga Kebersihan	2 Orang
JUMLAH		72 Orang

Peran tenaga administrasi bagi BPBD sangat penting artinya untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi secara umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan teknis yang bersifat langsung. Bagi tenaga administrasi bidang keuangan, akan melaksanakan tugas keseharian di bidang keuangan. Pun demikian tenaga administrasi yang berhubungan dengan urusan pelayanan rutinitas perkantoran, akan melakukan tugas administrasi sesuai dengan apa yang telah tertera dalam ikhtisar jabatan. Dan berikut disampaikan struktur organisasi BPBD Kab. Natuna.

E. Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. DASAR HUKUM
- D. GAMBAR UMUM BPBD
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- C. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KAB. NATUNA

- A. CAPAIAN KINERJA BPBD
- B. PENGUKURAN KINERJA
- C. ANALISIS KINERJA

D. KINERJA MANDIRI BPBD

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

Bab 11

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Visi Misi RPJMD 2025-2029

Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode 2025 -2029, membawa perubahan mendasar terhadap arah kebijakan pembangunan di daerah terluar Indonesia ini. Dua pemimpin ini, merumuskan visi lima tahunan yang coba diwujudkan selama masa kepemimpinan mereka. Visi yang dimaksud adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"

Misi Bupati terpilih tahun 2025 -2029 adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan
2. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau
3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telaah terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung BPBD. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke Pertama yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada Misi ini selain berperan dalam memberikan pelayanan prima berupa penciptaan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, BPBD

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta daya tampung, daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Indikator Kinerja Utama

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Natuna

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Dan berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Natuna.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Natuna 2025-2029

Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Data Awal	Target				
				2023/2024	2025	2026	2027	2028	2029
Menurunkan Risiko Bencana Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46
	Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63.36	70	71	72	73	74
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3.19	3.46	3.47	3.48	3.49	3.50

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat risiko bencana di Kabupaten Natuna. IRB diukur melalui rumus:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Keterangan:

Mengutip Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020, disebutkan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability

(kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di kabupaten. Perhitungan tingkat risiko ini dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan *Capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten sesuai dengan bahaya yang dimiliki serta gabungan dari bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah adalah indeks yang mengukur ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, baik bencana alam atau pun bencana non alam. IKD ini memiliki tujuh fokus prioritas dan 71 indikator penilaian, di mana pada akhir penilaian akan didapat sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi bencana di daerah masing-masing. Maka berdasarkan uraian di atas, Indikator Kinerja Utama BPBD adalah :

C. Program Kerja dan Kegiatan

Program BPBD Pendukung Visi Misi RPJMD 2025 -2029

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025, hanya melaksanakan 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan Dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Penjelasan rincinya sebagai berikut.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Sub kegiatan koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
2. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (per Jenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana & Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kab/ Kota
2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/ Kota

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

2. Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Setiap kegiatan yang ada, diarahkan untuk mengakomodir pelayanan perkantoran dan kebutuhan tiga bidang. Ada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana kegiatan ini akan dijalankan secara berkesinambungan.

Program dan Kegiatan SPM BPBD 2025

Mempehatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut adalah jenis pelayanan dasar yang masuk dalam standar pelayanan minimal BPBD 2025:

Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Bencana

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Anggaran
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	Rp. 124.051.620,00
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Rp. 77.023.258,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Rp. 106.941.838,00

Untuk kegiatan SPM ini, pada tahun anggaran 2025, BPBD telah mengalokasikan Rp. 308.016.716,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran Kegiatan SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	413.600.000,00	124.051.620,00	(289.548.380,00)
2.	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	74.799.500,00	77.023.258,00	2.223.758,00
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	87.607.500,00	106.941.838,00	19.334.338,00
Jumlah		576.007.000,00	308.016.716,00	(267.990.284,00)

Dari data di atas, dapat digambarkan bahwa telah terjadi pengurangan anggaran kegiatan dan sub kegiatan SPM di Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan adanya refokusing anggaran di Kabupaten Natuna, dengan demikian pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan urusan bencana di Kabupaten Natuna masih dapat disejalankan dengan anggaran yang ada.

Bab 111

Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi, program, atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan indikator kinerja yang Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Capaian ini menggambarkan sejauh mana hasil yang diharapkan dapat direalisasikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun efisiensi pelaksanaan. Dengan memahami capaian kinerja secara komprehensif, pengelola dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, memperbaiki kendala, dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan program di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna, mengukur capaian kinerja mengacu pada hasil kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, yang meliputi upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pasca-bencana. Kinerja yang baik dicerminkan melalui keberhasilan BPBD dalam menjalankan program-program strategis, seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membangun sistem yang mendukung pengurangan risiko bencana, dan menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, capaian kinerja BPBD juga ditentukan oleh indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti rencana strategis atau rencana kerja tahunan. Indikator-indikator tersebut dapat mencakup jumlah program yang terealisasi, tingkat kesiapsiagaan masyarakat, penurunan dampak bencana, hingga efektivitas anggaran yang digunakan. Dengan kata lain, capaian kinerja BPBD mencerminkan sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan lingkungan yang lebih aman dari risiko bencana

Pada tahun anggaran 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna mengelola dana pembangunan urusan bencana sebesar **Rp. 6.064.465.304,00** seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		2025				Persentase (%)
		Kinerja		Anggaran		
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		91	91	5.746.479.800,00	5.401.080.629,00	93.99 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80	80	46.315.000,00	32.424.894,00	70.01 %
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	14.691.000,00	4.642.894,00	31.60 %
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	31.624.000,00	27.782.000,00	87.85 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tepat Waktu	Tepat Waktu	4.176.819.398,00	4.076.124.216,00	97.59 %
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27	28	4.176.819.398,00	4.076.124.216,00	97.59 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95	95	53.321.494,00	34.593.768,00	64.88 %
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	70	45.312.494,00	27.562.494,00	60.83 %
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	10	8.009.000,00	7.031.274,00	87.79 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah		75	79	139.166.000,00	77.016.873,00	55.34 %
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5	63.563.000,00	28.870.673,00	45.42 %
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10	10	17.369.500,00	6.532.500,00	37.61 %
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24	24	24.250.000,00	18.096.000,00	74.62 %
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	33.983.500,00	23.517.700,00	69.20 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60	60	161.022.000,00	161.022.000,00	100 %
1.	Belanja Mebel	3	3	30.169.000,00	30.169.000,00	100 %
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34	34	130.853.000,00	130.853.000,00	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	945.624.750,00	878.094.156,00	92,86 %
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	24.164.750,00	23.794.557,00	98,47 %
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	10.100.000,00	6.950.557,00	68,82 %
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	911.360.000,00	847.349.042,00	92,98 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	224.211.158,00	141.804.722,00	63,25 %
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	10	160.964.958,00	106.334.522,00	66,06 %
2.	Pemeliharaan Peralatan dan	67	67	34.000.000,00	6.224.000,00	18.31 %

	Mesin Lainnya					
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	29.246.200,00	29.246.200,00	100 %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100	100	317.985.504,00	192.568.126,00	60,56 %
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	100	124.051.620,00	76.830.616,00	61,93 %
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	1	94.441.620,00	56.623.686,00	59,96 %
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50	50	29.610.000,00	20.206.930,00	68,24 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100	100	77.023.258,00	59.959.984,00	77,85 %
1.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	1	77.023.258,00	59.959.984,00	77,85%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	100	106.941.838,00	92,306,685.00	48,05 %
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2	2	49.805.838,00	18.181.828,00	36,51 %
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1400	177	57.136.000,00	33.200.000,00	58,11 %
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100	100	9.968.788,00	4.395.698,00	44,09 %
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	1	1.568.788,00	1.568.788,00	100,00%
2.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1	1	8.400.000,00	2.826.910,00	33,65 %

B. *Pengukuran Kinerja*

Pengukuran Kinerja merupakan Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam 5 kategori penilaian Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna, digunakan skala nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Penilaian

No	Kategori	Interval Nilai	Kategori Capaian
1	A	91 ≥	Sangat Tinggi
2	B	76-90	Tinggi
3	C	66-75	Sedang
4	D	51-65	Rendah
5	E	≥ 50	Sangat Rendah

c. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam kinerja tahun 2025.

Pencapaian Kinerja yang di ukur melalui 3 indikator sasaran pada perangkat daerah yang capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.41	0.29	71 %	0.42	0.43	102 %
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63.36	70.85	112 %	70	LHE Inspektor at belum keluar	-
3		Indeks	3.48	3.19%	91.6 %	3.48	3.19%	91.6%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 3 (Tiga) Indikator sasaran yang telah di targetkan pada tahun 2025 terealisasi semua akan tetapi untuk Nilai realisasi Kinerja Pemerintah daerah pada 2025 hasilnya belum masuk penilaian berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.

1. Sasaran Kinerja

➤ Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana

Sasaran kinerja **“Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana”** merupakan fokus utama BPBD Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya daerah yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yang menggambarkan tingkat ketahanan daerah terhadap bencana. Hasil pengukuran menunjukkan capaian yang **positif dan melampaui target yang ditetapkan**, tercermin dari peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Target IKD Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar **0,42** berhasil direalisasikan sebesar **0,43** atau mencapai **102 persen**, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana secara terintegrasi.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan perencanaan kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan daerah.

Dengan tercapainya sasaran kinerja ini, BPBD Kabupaten Natuna telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam mendukung pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan daerah. Capaian ini sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penguatan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan dan mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang akuntabel dan berorientasi hasil.

➤ *Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah*

Sasaran kinerja “**Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah**” merupakan komitmen BPBD Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil dan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kebencanaan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat. Sasaran ini diukur melalui 2 indikator yaitu:

1. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, yang mencerminkan tingkat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Pada saat LAKIP ini disusun, pengukuran terhadap indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** masih **menunggu penetapan resmi hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna**. Meskipun demikian, BPBD Kabupaten Natuna telah melaksanakan berbagai upaya penguatan manajemen kinerja, antara lain melalui penyempurnaan dokumen perencanaan berbasis kinerja, penajaman indikator kinerja utama dan sasaran, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta penguatan keterkaitan antara kinerja dan penganggaran.

Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah setelah hasil evaluasi ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi SAKIP akan dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan layanan publik kebencanaan, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di BPBD Kabupaten Natuna.

2. **Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah**, yang mencerminkan tingkat kualitas penyelenggaraan layanan publik, baik dari aspek prosedur, waktu layanan, kompetensi petugas, maupun kepuasan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian **Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah** BPBD Kabupaten Natuna menunjukkan hasil yang **positif dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya**. Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan standar pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung layanan kebencanaan, serta penguatan mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan. Upaya ini berdampak pada meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat,

khususnya dalam situasi kedaruratan bencana.

Capaian sasaran ini menunjukkan komitmen BPBD Kabupaten Natuna dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Hasil pengukuran indeks pelayanan publik tersebut menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan guna memastikan layanan kebencanaan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Bab IV

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Natuna disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana selama Tahun Anggaran 2025. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif dan mencerminkan meningkatnya efektivitas, efisiensi, serta kualitas penyelenggaraan urusan kebencanaan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan semakin kuatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, pada tahun anggaran berikutnya BPBD Kabupaten Natuna akan memfokuskan upaya perbaikan pada penguatan manajemen kinerja secara menyeluruh. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja, penajaman sasaran dan indikator kinerja utama, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja, serta penguatan keterkaitan antara kinerja dan penganggaran. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana akan terus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas layanan publik kebencanaan.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPBD Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya untuk **meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun berikutnya** melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP serta penerapan perbaikan berkelanjutan pada seluruh siklus manajemen kinerja. Peningkatan Nilai SAKIP diharapkan dapat mencerminkan kinerja organisasi yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas di Kabupaten Natuna.

LAMP? RAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RAJA DARMIKA, ST, MAP**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.42

Jumlah Anggaran :

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.846.625.500,00
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	613.798.500,00
Jumlah		Rp.	7.460.424.000,00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAJA DARMIKA, ST, MAP**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CEN SUI LEN**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja Perubahan tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 5.999.912.840.00 (Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp. 6.040.525.304.00 (Enam miliar empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

CEN SUI LEN

Ranai, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,

RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.42

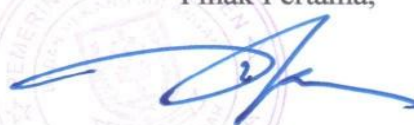
Jumlah anggaran:

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.746.475.800.00
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	294.049.504.00
	Jumlah	Rp.	6.040.525.304.00

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP BB atau baik, saya (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.



Ranai, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,



RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 19741216 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Komplek Gedung Utaraku, Gedung Diklat I Lantai I Ranai Web : www.bpb.d.natunakab.go.id Email : bpb.d@natunakab.go.id
Telepon 08117090112, Kode Pos : 29783



MONEV/RENCANA AKSI BPED 2025

No	Program Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target	Target Kinerja							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
1	PROGRAM Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase layanan dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase	91	57	63%	81	89%	87	96%	91	100%
					1.133.451.567		1.395.809.277		1.575.117.340		1.296.702.505	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	80	60		70		79		80	
					2.058.000		8.791.896		20.760.068		814.930	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	50%	2	100%	-	-	-	-
					980.000		1.337.896		1.510.068		814.930	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	3	2	67%	-	-	-	-	3	100%
					1.078.000		7.454.000		19.250.000		-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
					887.823.654		1.028.786.459		1.095.657.181		1.063.856.922	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	28	104%	28	104%	28	104%	28	104%
					887.823.654		1.028.786.459		1.095.657.181		1.063.856.922	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase	95	40		70		95		95	
					5.000.000		3.305.994		25.751.124		536.650	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	70	-	-	25		70		-	-
					-		2.762.494		24.800.000			
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10		10		10		10	
					5.000.000		543.500		951.124		536.650	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persentase	75	25	33%	48	64%	56	75%	75%	100%
					12.994.500		14.954.430		28.060.059		21.007.884	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Target Kinerja							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	-	-	2	-	5	-	5	-
							4.685.930		12.248.859		11.935.884	
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	2	-	6	-	10	-	-	-
						1.163.000		4.809.500		560.000		-
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	6	-	12	-	18	-	24	-
						350.000		2.246.000		6.428.000		9.072.000
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
						11.481.500		3.213.000		8.823.200		-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persentase	60	-	-	40	67%	60	100%	-	-
						-		20.740.000		140.282.000		-
5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	-	-	2	67%	3	100%	-	-
						-		17.289.000		12.880.000		-
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	-	-	4	12%	34	100%	-	-
						-		3.451.000,00		127.402.000		-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						220.452.913		282.126.130		186.727.968		188.787.145
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
						-		13.186.000		5.669.000		4.939.557
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
						1.313.500		300.000		1.013.500		4.323.557
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
						219.139.413		268.640.130		180.045.468		179.524.031
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100	45%	45%	67%	67%	88%	88%	100%	100%
						5.122.500		37.104.308		77.878.940		21.698.974
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1	-	3	-	10	-	-	-
						5.122.500		7.858.108		71.654.940		21.698.974

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Target Kinerja							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67	-	-	-	-	67	100%	-	-
					-		-		6.224.000		-	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	-	-	1	100%	-	-	-	-
					-		29.246.200		-		-	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yg memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	Persentase	100	20%	20%	65%	65%	90%	90%	100%	100%
					14.115.000		88.989.506		15.321.332		741.42.288	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persentase	100	20%	20%	35%	35%	85%	85%	100	100%
					-		19.712.920		2.741.332		54.376.364	
1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	50	-	-	-	-	-	-	50	100%
					-		206.966		900.000		19.099.964	
1.2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legit	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
					-		19.505.954		1.841.332		35.276.400	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase	100	60%	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
					12.596.000		25.404.238		10.611.000		11.348.746	
2.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan Melkumut Pelayanan yang sah dan legit adalah total laporan layanan Pusdalops yang telah disusun dan ditetapkan secara resmi sesuai jenis ancaman bencana di wilayah setempat.	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
					12.596.000		25.404.238		10.611.000		11.348.746	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Target Kinerja							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					1.519.000		41.953.232		1.969.000		5.940.596	
31	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
					1.519.000		8.753.232		1.969.000		5.940.596	
3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1400								
					-		33.200.000		-		-	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Lembaga Kebencanaan/Perangkat Daerah yang terlibat dalam Penataan Sistem Penanggulangan	Persentase	100	20%	20%	80%	80%	-	-	100%	100%
					-		1.919.116		-		2.476.582	
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
					-		1.568.788		-		-	
4.2	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilevelkan	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	1	100%
					-		350.328		-		2.476.582	
		Realisasi Anggaran Per Triwulan			1.147.566.567		1.484.798.723		1.590.438.672		1.370.844.793	

Renai, 05 Januari 2026

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Natuna**



Ditandatangani secara elektronik
RAJA DARMIKA, ST., M.A.P.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

